

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN KARTU DEBIT SEBAGAI TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

(Studi Kasus Putusan Nomor 1985/Pid.B/2012/PN.MKS)



**OLEH :
ZAINAL ARIEF M.
B11111145**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN KARTU DEBIT
SEBAGAI TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

(Studi Kasus Putusan Nomor 1985/Pid.B/2012/PN.Mks)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Hukum Dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

OLEH:

ZAINAL ARIEF M

B111 11 145

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

PENGESAHAN SKRIPSI

PENYALAHGUNAAN KARTU DEBIT SEBAGAI TINDAK PIDANA TRANSAKSI INFORMASI DAN ELEKTRONIK

(Studi Kasus Putusan No.1985/Pid.B/2012/PN.Mks)

disusun dan diajukan oleh

**ZAINAL ARIEF M.
B 111 11 145**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Sekretaris



Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

Persetujuan Pembimbing

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Zainal Arief M.
No. Pokok : B 111 11 145
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Kartu Debit Sebagai
Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik
(Studi Kasus Putusan Nomor 1985/ Pid.B/ 2012/
PN.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Makassar, 26 Januari 2016

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H.
NIP. 19590317 198703 1 002



Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **ZAINAL ARIEF M.**
No. Pokok : B111 11 145
B a g i a n : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penyalahgunaan Kartu Debit Sebagai Tindak Pidana
Transaksi Informasi Dan Elektronik (Studi Kasus
putusan Nomor.1985/Pid.B/2012/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2016


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

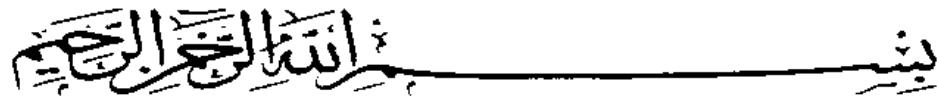
ZAINAL ARIEF M (B111 11 145), "*Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Kartu Debit Sebagai Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Studi Kasus Putusan Nomor 1985/Pid.B/2012/PN.MKS)", Dibimbing oleh **Muhadar** sebagai Pembimbing I dan **Nur Azisa** sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan kartu debit dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan kartu debit.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu Muhammad Arsyad dan Chaidir Qabir Bahar telah sesuai dengan dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum yakni Pasal 46 ayat (3) jo, Pasal 30 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang transaksi informasi dan elektronik. Berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis, dengan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).2) Dalam memutus perkara majelis mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan Pasal yang didakwakan, sehingga dinyatakan bersalah. Kemudian adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan menimbulkan ketakutan bagi warga sekita, sedangkan ha-hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa masih dibawah umur yang masih perlu bimibingan dan ingin menggapai masa depan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dan terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya. Kedua hal tersebut juga menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Sesungguhnya Allah SWT senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu.

Tiada kata yang patut diucapkan selain puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul ***Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Kartu Debit Sebagai Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik. (Studi Kasus Putusan Nomor 1985/Pid.B/2012/PN.Mks)***, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tertinggi kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda **Mansyur Abdullah Bae.** dan Ibunda **A. Nurcaya Mansyur, S.E.** yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kesabaran, rasa kasih sayang, perhatian, pengorbanan, keringat dan air mata serta do'a yang tidak pernah putus.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S** selaku pembimbing I dan **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** selaku pembimbing II atas bimbingan, transfer ilmu, tenaga, waktu yang diberikan dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil kepada:

1. **Prof. Dr. Farida Patingtingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.** selaku Pembantu Dekan I, **Dr. Syamsuddin, S.H., M.H.** selaku Pembantu Dekan II dan **Dr. Hamzah, S.H., M.H.** selaku Pembantu Dekan III.
2. **Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., Dr. Haeranah, S.H., M.H.** dan **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** selaku penguji atas arahan dan saran selama penulis ujian.
3. **Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Dosen Bagian Hukum Pidana,** terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis, semoga Allah SWT membalasnya dengan limpahan pahala. Amin
4. **Staf Pengurus Akademik** beserta jajarannya yang tak kenal lelah membantu penulis selama kuliah.
5. **Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta jajarannya** yang telah memberikan bantuan, meluangkan waktunya dan kerja samanya selama penulis melakukan penelitian.
6. Kepada teman-teman seperjuangan selama di Fakultas Hukum, **Muh Muallif Heru W, Try Fandy Nasir, Muh Abdillah Fadlyansyah, M Fadhil Putra, Muh Febriansyah, A Arie Veriansyah, Aldi Rinaldi, Asfar Amien, Irfan Nur Hadi, Zulham**

Syahrir, Agung Hidayat, Zakaria, Ichwan Setiawan, Nizamul Nadvi, Edwin Iksan, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya selama ini.

7. Teman-teman KKN Reguler Gel. 87 Unhas Kec. Mare dan teman posko Desa Data, **Andi Adilah Bunyamin, Dian, Irma, Lina, Resky, Syarif.**
8. Teman-teman **MEDIASI 2011** yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis bukanlah seorang yang sempurna. Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan sehingga saran dan kritik yang sifatnya konstruktif akan menjadi masukan yang sangat berguna menuju kesempurnaan penulisan ini. Tidak lupa pula penulis mohon maaf atas segala kekhilafan.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, 26 Februari 2016

Penulis

Zainal Arief M

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Penyalahgunaan	8
B. Pengertian Kartu Debit	13
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	15
1. Definisi Tindak Pidana	15
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	19
3. Rumusan Tindak Pidana	25
D. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik.....	29
E. Ketentuan dan Kebijakan Kriminal dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	39
B. Jenis dan Sumber Data	39
C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Analisis Data	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Debit dalam Studi Kasus Putusan Nomor 985/Pid.B/2012/PN.Mks	41
1. Identitas Terdakwa	41
2. Posisi Kasus	42
3. Dakwaan Penuntut Umum	44
4. Tuntutan Penuntut Umum.....	59
5. Amar Putusan.....	60
6. Analisis Penulis	61
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 985/Pid.B/2012/PN.Mks	68
1. Pertimbangan Hakim	68
2. Analisis Penulis	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA.....	77
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Negara Hukum secara khusus adalah negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai hukum. Bahkan ketentuan ini untuk mencegah terjadi kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan alat negara maupun penduduk.

Dalam kehidupan sehari-hari hukum merupakan salah satu bidang yang sangat erat kaitannya dengan perilaku seseorang, tidak dapat dipungkiri bahwa hampir sebagian besar aspek kehidupan manusia sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial diatur di dalam hukum.

Memenuhi kebutuhan hidup menjadi wajib bagi seseorang demi kelangsungan hidupnya. Perkara inipun tak luput dari aturan hukum yang ada. Namun seiring dengan perkembangan ekonomi global yang memberi dampak pada Negara Indonesia berupa fenomena yaitu tidak bisa lagi semudah membalik telapak tangan dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Selain karena polemik ekonomi

yang terus berfluktuasi juga diakibatkan oleh sulitnya seseorang dalam membedakan antara yang kebutuhan dan keinginan. Pada kenyataannya hanya sebagian anggota masyarakat yang dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan hidupnya dan yang masyarakat lainnya justru mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seseorang dalam memenuhi kebutuhan saat ini cenderung menghalalkan segala cara baik yang baik maupun buruk. Apalagi kebutuhan tersebut merupakan sesuatu yang harus segera dipenuhi terkadang tidak lagi mempertimbangkan cara untuk memenuhinya. Selain itu, mayoritas masyarakat telah menginginkan segala sesuatu yang dimiliki haruslah yang praktis dan ekonomis terutama dalam hal sistem pembayaran atau transaksi.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan dituntut untuk meningkatkan fungsi dan peranannya sebagai penggerak dan mobilisasi dana masyarakat yang efektif dan sebagai penyalur yang cermat dari dana tersebut untuk pembiayaan kegiatan ekonomi yang produktif.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengatakan bahwa Bank adalah sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien dengan berasaskan pada demokrasi ekonomi yang mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka untuk

meningkatkan pemerataan pembangunan, dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, dunia perbankan sebagai lembaga keuangan juga turut menentukan dalam rangka meningkatkan upaya pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Perkembangan perekonomian nasional dan internasional tentunya telah menimbulkan persaingan diantara bank-bank yang ada, yang masing-masing berusaha untuk memberikan pelayanan jasa terbaiknya kepada para nasabah, oleh karena itu masing-masing bank juga senantiasa menciptakan produk-produk baru dalam rangka retail on-line yaitu pelayanan jasa Bank kepada para nasabahnya selama 24 jam sehari yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan pihak Bank kepada nasabahnya.

Adapun jenis-jenis jasa pelayanan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai transaksi *Retail On-Line* kepada para nasabahnya antara lain Kartu Kredit, Kartu Debet, Smart card, bank teller input, ATM (Automatic Teller Machine), dan *electronoc funds transfer at point of sale* (EFT / POS).

Kartu debit adalah salah satu produk perbankan berupa kartu plastik yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan. Perkembangan penggunaan kartu plastik dalam berbagai bentuknya menunjukkan

bahwa alat ini tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran tetapi juga untuk tujuan lain seperti penarikan uang tunai. Berdasarkan pertimbangan dapat dibawa berpergian dengan praktis, dapat digunakan sewaktu-waktu dan kemudahan penggunaan yang lain kartu plastik ini semakin luas digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan.

Selain sebagai miniatur tabungan yang kita miliki di bank dan bisa diambil kapanpun dimanapun ternyata kartu debit juga sebagai alat pembayaran ditempat-tempat seperti pasar, swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat lainnya, penggunaan berbagai jenis kartu debit disebabkan beberapa faktor yaitu untuk kenyamanan, kemudahan, dan unsur praktis bagi penggunanya.

Mekanisme perolehan kartu debit yang tidak sulit dan fasilitas kenyamanan yang sangat menjanjikan membuat penggunaan kartu debit yang makin meningkat dari tahun ke tahun. Namun negatifnya adalah tidak menutup kemungkinan timbul penyalahgunaan debit dengan berbagai modus yang menimbulkan kerugian tidak saja bagi bank tetapi juga bagi orang lain yang bersangkutan, hal itu dapat berakibat terjadinya *cash out* yang telah melampaui kewenangan atau penjembohan sistem pengaman di kasir perbelanjaan contohnya.

Penyalahgunaan kartu debit tidak menutup kemungkinan diakibatkan oleh dampak negatif dari kehadiran teknologi informasi dan transaksi elektronik yang telah dimanfaatkan dalam kehidupan

sosial masyarakat. Sehingga seseorang dalam memenuhi kebutuhannya dengan cepat dan sesuai keinginannya cenderung memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi informasi dan transaksi elektronik. Teknologi informasi dan transaksi elektronik selain memberikan dampak positif tanpa disadari akan dijadikan sebagai sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru (*cyber crime*) oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga diperlukan upaya proteksi. Untuk itu dapat dikatakan teknologi informasi dan transaksi elektronik bagaikan pedang bermata dua, selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan perdaban manusia juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melawan perbuatan hukum.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggungjawab yang harus diemban oleh negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaata teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

Konsideran UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa pembangunan nasional yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dimulai pada era orde baru hingga saat ini, merupakan proses yang berkelanjutan dan harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di

masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat itu, akibat pengaruh globalisasi informasi, telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional.

Dengan melihat semakin meningkatnya kejahatan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik khususnya penyalahgunaan kartu debit. Maka penulis tertarik untuk mengetahui tentang tindak pidana penyalahgunaan kartu debit secara mendalam. Untuk itu diperlukan penelitian mengenai “Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Kartu Debit Sebagai Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 1985/Pid.B/2012/PN.Mks)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dari penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Debit dalam studi kasus Putusan Nomor 985/Pid.B/2012/PN.Mks?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Nomor 1985/Pid.B/2012/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan hukum tindak pidana penyalahgunaan kartu debit.

2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 1985/Pid.B/2012/PN.MKS.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum kepidanaan pada khususnya, serta dapat mengetahui keserasian antara ilmu hukum yang didapatkan dibangku kuliah dengan praktek yang ada dilapangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah, maupun para penegak hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyalahgunaan Teknologi

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya (Salim: 1991). Sedang teknologi merupakan alat yang dikembangkan untuk membantu manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Semakin pesatnya teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini menunjukkan bahwa tidak adanya batas antara mana yang bersifat publik dan mana yang bersifat privasi. Teknologi yang ada terutama internet juga memberikan berbagai macam efek terhadap pola hidup manusia serta sangat bermanfaat sebagai media untuk belajar, komunikasi promosi, dan sebagainya.

Disisi lain teknologi ternyata membuka peluang para pelaku kejahatan di dunia maya yang dikenal dengan istilah *cyber crime* sebagai salah satu dampak negatifnya. *Cyber crime* adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/carding, confidence fraud, penipuan identitas dan pornografi anak.

Awalnya *cyber crime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Mandell (Suhariyatno: 2013) membagi *computer crime* atas dua kegiatan yaitu:

1. Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan;
2. Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.

Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari identifikasi terhadap definisi cybercrime lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia maya melalui sistem informasi yang digunakan. Cybercrime tidak sekedar pada komponen hardwarenya saja tetapi sudah dapat diperluas dalam lingkup dunia yang dijelajah oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan. (Suhariyatno: 2013)

Pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang (*cyber crimes*) mengacu pada ketentuan dalam *EU Convention on Cyber crimes*. Beberapa materi perbuatan yang dilarang yang diatur dalam UU ITE antara lain:

- a. konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE)

- b. akses ilegal (Pasal 30)
- c. intersepsi ilegal (Pasal 31)
- d. gangguan terhadap data (*data interference*, Pasal 32 UU ITE)
- e. gangguan terhadap sistem (*system interference*, Pasal 33 UU ITE)
- f. penyalahgunaan alat dan perangkat (*misuse of device*, Pasal 34 UU ITE)

Jenis dan undang – undang yang membahas *cyber crime* beberapa diantaranya, sebagai berikut:

1. Unauthorized Access

Merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Probing dan port merupakan contoh kejahatan ini.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer dan atau sistem elektronik. (Pidana empat tahun penjara dan denda Rp 1 miliar)

2. Illegal Contents

Merupakan kejahatn yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, contohnya adalah penyebaran pornografi.

Pasal 26

Setiap orang dilarang menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan pornografi, pornoaksi, perjudian, dan atau tindak kekerasan melalui komputer atau sistem elektronik. (Pidana 1 tahun dan denda Rp 1 miliar).

3. Data Forgery

Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database.

Pasal 23

(2) Pemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. (Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana) (Pidana enam bulan atau denda Rp 100 juta)

Pasal 27

(2) Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi. (Pidana 20 tahun dan denda Rp 10 miliar).

4. Carding

Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.

Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya untuk memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari Bank Sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang menyebarkan, memperdagangkan, dan atau memanfaatkan kode akses (password) atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos komputer dan atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan yang akibatnya dapat mempengaruhi sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan, serta perniagaan di dalam dan luar negeri.

5. Hacking dan Cracker

Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut cracker.

Cracker ini sebenarnya adalah hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan account milik orang lain, pembajakan situs web,

probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DOS (*Denial Of Service*). *DOS attack* merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target (*hang, crash*) sehingga tidak dapat memberikan layanan.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer dan atau sistem elektronik. (Pidana empat tahun penjara dan denda Rp 1 miliar).

B. Kartu Debit

Kartu debit (debit card) atau merupakan suatu alat berbentuk kartu plastik yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian transaksi pembelian barang dan jasa dengan cara mendebit atau mengurangi saldo rekening simpanan pemilik kartu (*card holder*) serta pada saat yang sama mengkredit saldo rekening penjual (*merchant*) sebesar nilai transaksi barang dan jasa. Sistem penggunaan kartu debit ada yang sudah *on line* dan ada juga yang belum *on line*.

Sistem yang belum *on line* berarti bahwa pada saat pemilik kartu menggunakan kartunya untuk berbelanja maka transaksi pendebitan rekening simpanannya tidak secara otomatis pada saat yang bersamaan. Pendebitan rekening pemilik kartu dan pengkreditan rekening penjual pada bank pengelola kartu hanya akan dilakukan

setelah merchant menyerahkan bukti penggunaan kartu (pembayaran dengan kartu debit) pada toko atau tempat usahanya.

Sistem ini mengandung risiko bahwa saldo rekening simpanan pemilik kartu tidak cukup untuk menutup transaksi pembelian yang telah dilakukan. Apabila sistem ini telah *on line*, maka saat pemilik kartu menggunakan kartunya untuk berbelanja pada saat itu juga merchant dapat melihat saldo rekening simpanan pemilik kartu pada bank pengelola kartu debit tersebut. Dengan cara ini *merchant* dapat menentukan apakah kartu tersebut masih cukup untuk menutup nilai transaksi yang akan dilakukan ataukah tidak. Pada saat yang bersamaan mesin atau peralatan yang ada pada merchant dapat melakukan pendebitan rekening simpanan pemilik kartu debit dan sekaligus pengkreditan rekening *merchant* sendiri. Dengan demikian, setiap kali pemilik kartu menggunakan kartu debatnya untuk berbelanja, maka saat yang bersamaan saldo rekening pinjamannya akan berkurang dalam nilai yang sama.

Keuntungan memiliki kartu ATM atau kartu Debit antara lain :

1. Mudah, karena tidak perlu datang ke Bank untuk melakukan transaksi atau memperoleh informasi.
2. Aman, karena tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksi belanja di toko.

3. Fleksibel, karena transaksi penarikan tunai / pembelian via ATM/EDC dapat dilakukan di jaringan bank sendiri, jaringan lokal dan jaringan internasional.
4. Leluasa, karena dapat bertransaksi setiap saat meskipun hari libur.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Kartonegoro: 1990).

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak

pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:

"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo (1992) berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo (1992) juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok

dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas.

(*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari Von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- (a) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-undang.
- (b) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- (c) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara

keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya (Kartonegoro: 1990).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur- unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh Undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri

pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (Lamintang: 1997).

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - (i) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
 - (ii) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - (iii) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP (Lamintang: 1997).

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415

KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat (Lamintang: 1997). Seorang ahli hukum yaitu Simons (Andi Hamzah: 2008) merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) diancam dengan pidana oleh hukum;
- b) bertentangan dengan hukum;
- c) dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d) orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Di bawah ini akan diberikan berturut-turut pendapat para penulis mengenai tindak-pidana (*strabaar feit*) dan disebutkan mengenai unsur- unsurnya. Golongan pertama adalah mereka yang bisa di maksudkan kedalam “aliran monistis” dan kemudian akan di kemukakan mereka yang dapat disebut sebagai yang mempunyai pandangan ”dualistis“. Golongan monistis atau pertama adalah: Simons (Sudarto: 1990) mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. perbuatan manusia (positief atau negatief; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. diancam dengan pidana (*Stratbaar gesteld*);

- c. melawan hukum (*onrecht matig*);
- d. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekenings vat baar persoon*).

Van Hamel (Sudarto: 1990) mengemukakan unsur-unsurnya tindak pidana adalah :

- a. perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang;
- b. melawan hukum;
- c. dilakukan dengan kesalahan;
- d. patut dipidana.

Emezger (Sudarto: 1990) mengemukakan: "Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana" unsur-unsur tindak pidana adalah: Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);

- a. sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun yang subyektif);
- b. dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang;
- c. diancam dengan pidana.

J Baumann (Sudarto: 1990) mengemukakan: "Perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan ".

Karni (Sudarto: 1990) mengemukakan: "Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak yang dilakukan

dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan”.

Wirjono Prodjodikoro (Sudarto: 1990) beliau mengemukakan definisi pendek yakni: “Tindak-pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana jelas sekali dari definisi-definisi tersebut diatas tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*”.

Mereka yang bisa dimasukkan sebagai golongan yang mempunyai pandangan “dualistik” tentang syarat-syarat pemidanaan mereka yaitu HB. Vos mengemukakan bahwa untuk syarat-syarat pidananya adalah:

- a. kelakuan manusia dan
- b. diancam pidana dalam undang-undang

Moeljatno mengemukakan “perbuatan pidana” sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. perbuatan
2. yang memenuhi rumusan dalam undang-undang
3. bersifat melawan hukum
4. kelakuan manusia dan
5. diancam pidana dalam undang-undang.

Menurut jenisnya, tindak pidana terdiri atas :

1. Tindak pidana sengaja (delik sengaja)

Delik ini disyaratkan adanya unsur sengaja (*opzettelijk*). Menurut *MvT (Memorie van Toelichting)* / Memori penjelasan, yang dimaksud dengan sengaja adalah sama dengan dikehendaki atau diketahui (Ranoemihardja, 1984:97).

2. Tindak pidana kealpaan (delik Culpa) Adapun jenis culpa adalah sebagai berikut :

- a. Culpa Lata : Kealpaan yang berat, besar atau mencolok;
 - b. Culpa Levis : Kealpaan yang ringan;
 - c. Culpa Levissima : Kealpaan yang sangat ringan
- (Ranoemihardja, 1984:101).

Pompe mengemukakan hal-hal mengenai adanya kelalaian sebagai berikut :

- (a) Si pembuat dapat menduga atau sebelumnya dapat mengerti agak pasti akan terjadinya akibat dari perbuatannya.
 - (b) Si pembuat sebelumnya melihat kemungkinan akan terjadinya akibat dari perbuatannya.
 - (c) Si pembuat sebelumnya dapat melihat kemungkinan akan terjadinya akibat dari perbuatannya
- (Ranoemihardja: 1984).

3. Pengertian Tindak Pidana

Telah diketahui bahwa sumber hukum pidana ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis (hukum pidana adat). Agar supaya orang dapat mengetahui bagaimana hukumnya tentang sesuatu persoalan, maka aturan hukum itu dirumuskan. Demikian pula keadaanya dalam hukum pidana. Perumusan aturan hukum pidana yang tertulis terdapat dalam KUHP dan dalam peraturan undang-undang lainnya.

Syarat pertama untuk memungkinkan penjatuhan pidana ialah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini adalah konsekuensi dari azas legalitas. Rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Undang-undang hukum pidana sifatnya harus pasti, didalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan. Pernah ada peraturan di Jerman, ketika diduduki oleh pihak sekutu setelah perang dunia II, yang berbunyi:

“Barangsiapa berbuat bertentangan dengan kepentingan angkatan perang sekutu dipidana (*“Wer gegen Interessen der allierten Streitkräfte handelt, wird bestraft”*).

Perumusan delik sedemikian itu tidak cukup karena lukisan syarat-syarat untuk pembedaan tidak pasti. Perumusan semacam itu bisa disebut pasal “karet” (Sudarto: 1990). Arti perbuatan “yang memenuhi atau mencocoki rumusan delik dalam undang-undang”

yakni perbuatan konkrit dari sipembuat itu harus mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri dari delik itu sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam undang-undang, perbuatan itu harus “masuk” dalam rumusan delik itu. (Sudarto: 1990).

Dalam rumusan delik itu undang-undang melukiskan perbuatan yang dimaksud secara skematis, tidak secara konkrit. Misalnya Pasal 338 KUHP menggambarkan secara skematis syarat-syarat apa yang harus ada pada suatu perbuatan agar dapat dipidana berdasarkan Pasal (pembunuhan) tersebut.

Syarat-syarat itu juga disebut unsur-unsur delik. Pengertian unsur disini dipakai dalam arti sempit, ialah unsur yang terdapat dalam rumusan undang-undang. Rumusan dalam undang-undang ini tidak terikat akan tempat dan waktu. Tidak demikian halnya dengan perbuatan yang dimaksud. Ini adalah perbuatan konkrit, yang berlangsung disuatu tempat pada suatu waktu dan yang dapat ditangkap dengan pancaindera (Sudarto: 1990).

Di dalam KUHP perumusan delik itu biasanya dimulai dengan “barang siapa” dan selanjutnya dimuat lukisan perbuatan yang dilarang atau yang tidak dikehendaki atau yang diperintahkan oleh undang-undang. Lukisan ini merupakan suatu abstraksi dan tidak dihubungkan dengan tempat dan waktu, seperti telah dikemukakan diatas (Sudarto: 1990). Untuk perumusan norma

dalam peraturan pidana ada tiga cara :

- a. Menguraikan atau menyebutkan satu persatu unsur-unsur perbuatan, misalnya dalam tindak pidana yang disebut dalam Pasal :

- 1) 154-157 KUHP : *Haatzaai delicten* (menabur kebencian).
- 2) 281 KUHP : Pelanggaran kesusilaan.
- 3) 305 KUHP : Meninggalkan anak dibawah umur 7 tahun.
- 4) 413 KUHP : Seorang panglima tentara yang lalai terhadap permintaan pejabat sipil.
- 5) 435 KUHP : Seorang pegawai yang melakukan pemborongan pekerjaan jawatannya sendiri.

Cara perumusan demikian ini yang paling banyak digunakan.

- b. Hanya disebut kualifikasi dari delik, tanpa menguraikan unsur- unsurnya, misalnya :

- 1) Pasal 184 KUH : Duel (perkelahian tanding)
- 2) Pasal 297 KUHP : Perdagangan wanita
- 3) Pasal 351 KUHP : Penganiayaan

Oleh karena untuk delik-delik tidak ada penyebutan secara tegas apa unsur-unsurnya, maka untuk mengetahui apa

yang dimaksud perlu ada penafsiran yang didasarkan atas sejarah terbentuknya pasal itu. Misalnya: penganiayaan itu adalah tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditujukan kepada orang lain dan yang mengakibatkan sakit atau luka (*elke opzettelijke veroorzaking van pijn of letsel*). (Sudarto: 1990).

- c. Penggabungan cara pertama dan kedua yaitu disamping menyebutkan unsur-unsurnya, ialah menyebutkan perbuatan, akibat dan keadaan yang bersangkutan, juga disebutkan pula kualifikasi dari delik, misalnya :

- 1) Pasal 124 KUHP : Membantu musuh
- 2) Pasal 263 KUHP : Memalsukan surat
- 3) Pasal 338 KUHP : Pembunuhan
- 4) Pasal 362 KUHP : Pencurian
- 5) Pasal 372 KUHP : Penggelapan
- 6) Pasal 378 KUHP : Penipuan
- 7) Pasal 425 KUHP : Kerakusanpejabat (*knevelarij*)
- 8) Pasal 438 KUHP : Perompakan (*zoeroef*)

Dalam hubungan ini dapat ditambahkan, bahwa para Hakim dalam diktum keputusannya kerap kali hanya menyebutkan kualifikasinya saja dari tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa (Sudarto: 1990).

Pembuatan peraturan pidana yang memuat sanksi itu berarti, bahwa Negara memakai haknya untuk mempidana orang yang tidak mentaati normanya. Jadi apabila jalan pikiran Binding itu diikuti, maka orang yang melakukan pencurian itu tidak boleh dikatakan melanggar Pasal 362 KUHP dan orang yang sengaja membunuh orang lain itu tidak boleh dikatakan melanggar Pasal 338 KUHP, sebab mereka itu justru memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut, dan oleh karena itu dapat dipidana ex pasal-pasal tersebut.

Menurut Binding normanya selalu ada lebih dulu daripada aturan hukum pidana, walaupun tidak lebih dulu menurut waktu (*zeitlich*), setidaknya lebih dulu dalam pengertiannya (*begrifflich*). Norma yang terdapat dalam pasal 362 berbunyi : orang dilarang mencuri, dan didalam Pasal 338, orang dilarang membunuh

D. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik

Informasi bukanlah berasal dari bahasa Indonesia melainkan dari bahasa asing "*Information*" yang berasal dari kata dasar "*inform*" yang secara leksikal artinya adalah "*to give, imbue or character to;*" atau "*be the formative principle of*", atau "*to give, imbue or inspire with some spesific quality or character*". Jadi sepatutnya juga diperhatikan bahwa informasi bukanlah hanya sebagai suatu obyek ataupun output saja, yang lazim diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai suatu keterangan ataupun berita, melainkan juga

harus melihat kepada aspek pemrosesannya. Dengan kata lain validitas informasi sangat ditentukan oleh sejauh mana validitas pemrosesannya.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Pasal 1 mencantumkan pengertian dari Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menurut Turban, Rainer, dan Potter (2005), "*Data are raw facts or elementary description of things, events, activities, and transactions that are captured, recorded, stored, and classified, but not organized to convey any specific meaning. Example of data would include bank balance*". Data ialah gambaran dasar, fakta-fakta awal yang belum terperinci dari perihal, peristiwa, kegiatan, dan transaksi yang ditangkap, direkam, disimpan dan terklasifikasi tetapi tidak terorganisir untuk dapat menyatakan arti khusus apapun. Contoh data ialah saldo rekening bank.

Pengertian informasi menurut Turban, Rainer, dan Potter, "*Information is a collection of facts organized in some manner so that they are meaningful to a recipient. For example, if we include*

costumer names with Bank balance, we would have useful information". "Contoh informasi ialah saldo rekening bank yang disertai dengan identitas pemegang rekening". Dengan kata lain, informasi bersumber dari data yang telah diproses. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi elektronik dapat berupa catatan elektronik, data atau dokumen elektronik, surat-surat elektronik, ataupun tanda tangan elektronik.

Menurut Peter Zorkoczy (1998), teknologi informasi diartikan sebagai usaha pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penyebaran dan pemanfaatan informasi. Selain menyangkut perangkat keras dan lunak, teknologi informasi memperhatikan pula kepentingan manusia sehubungan dengan tujuan yang ditetapkan untuk teknologi itu sendiri, nilai-nilai yang digunakan dalam menentukan pilihan, serta kriteria penilaian untuk menyimpulkan apakah manusia mampu menguasai teknologi ini dan menjadi lebih lengkap karenanya.

Dalam definisi sempit, menurut Efraim Turban dalam *Information Technology for Management*, teknologi informasi mengacu pada sisi teknologi daripada suatu Sistem Informasi. Ia terdiri dari *hardware*, basis data, jaringan *software* dan piranti-piranti yang lainnya. Disini dipandang sebagai subsistem daripada sebagai informasi. Disisi lain *Information Technology* sering dipakai bergantian dengan *Information System*. Bahkan dipakai sebagai konsep yang

luas yang menggambarkan sebagai koleksi daripada beberapa sistem informasi, pemakai dan manajemen untuk seluruh organisasi.

Suatu data atau informasi yang telah diolah oleh sistem informasi secara elektronik tersebut, akan tersimpan di dalam suatu media tertentu, yang dinamakan dokumen elektronik. Sistem penyimpanan data dan/atau informasi elektronik yang berbasis komputer dinamakan *Database* dan data yang dikomunikasikan melalui media telekomunikasi dinamakan *Data Message*.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya.

Transaksi elektronik dirumuskan definisinya dari terminologi E-commerce (*Electronic Commerce*) atau mengarah pada perniagaan atau perdagangan, namun dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi tidak mendefinisikan E-commerce secara jelas. E-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang atau jasa (*trade of goods and servic*) dengan menggunakan media elektronik. *Electronic Commerce* adalah kemampuan untuk membentuk transaksi bisnis yang meliputi pertukaran barang dan jasa diantara dua pelaku bisnis

dengan menggunakan peralatan dan teknologi elektronika. Transaksi elektronik diatur dalam Pasal 17, bunyinya:

- (1) Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau pun privat;
- (2) Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

E. Ketentuan dan Kebijakan Kriminal dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Materi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model Law on eCommerce dan UNCITRAL Model Law on eSignature.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik berikut ini beberapa ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana informasi dan transaksi elektronik:

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik

dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 55 KUHP

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibatnya.

Pasal 64 KUHP

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

- (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
- (3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.

Pasal 374 KUHP

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Kebijakan penanggulangan kejahatan digunakan dua kebijakan, yaitu dengan menggunakan penal (segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan) atau dengan menggunakan sanksi pidana dan dengan kebijakan non penal (sanksi administratif, sanksi perdata, dan lain-lain).

Kebijakan kriminal yang dianut menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dapat dilihat dalam Pasal 30 yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang, atau perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang dilarang dan dianggap perbuatan melawan hukum adalah mengakses komputer dan/atau sistem elektronik yang bertentangan dengan hukum. Pengertian tentang perbuatan yang dapat dihukum atau perbuatan melawan hukum, dengan mengikuti pendapat van Hamel dan Hoge Raad (HR) tentang unsur melawan hukum atau

wederrichtelijk, yakni tanpa hak atau wewenangnya (*zonder eigenrecht of zonder eigen bevoegheid*).

Penjelasan Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008, bahwa secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini, dapat dilakukan antara lain, dengan:

- a. Melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan, atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapapun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau
- b. Sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau daerah.

Pasal 33

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum

pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Kepentingan pencegahan kejahatan melalui sarana penal dan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana maka ketentuan-ketentuan pidana berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE diatur dalam bab VIII Pasal 38, Pasal 40, dan Pasal 41 tentang penyelesaian sengketa yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian;
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan kepentingan masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu keteriban umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi;
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat dokumen elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data;
- (5) Instansi atau institusi lain, selain diatur pada ayat (3) membuat dokumen elektronik dan rekam cadang

elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik sesuai ketentuan undang-undang ini;
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat;
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di tempat-tempat yang memiliki data sesuai dengan permasalahan yang diangkat, yaitu Pengadilan Negeri Makassar dan instansi-instansi penunjang lainnya.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan metode wawancara kepada pihak yang berkompetensi, dalam hal ini hakim yang telah memiliki pengalaman menangani kasus penyalahgunaan kartu debit.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan atas buku-buku, dokumen-dokumen serta literatur lain yang menunjang objek yang sedang diteliti.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

1. Penelitian pustaka (*library research*) dengan melakukan telaah mendalam atas buku, karya ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang sesuai dengan objek yang diteliti.
2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan objek yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber sebagai sumber informasi yang telah memiliki pengalaman dalam penegakan hukum untuk mengetahui tanggapan, pendapat, pengalaman, keyakinan, serta harapan narasumber yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan kartu debit.
2. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode pencatatan dokumen-dokumen sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

D. Analisis Data

Data yang dikumpulkan secara keseluruhan akan dituangkan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dimaksudkan untuk dapat menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti dengan menyeluruh dengan hasil pengolahan data yang telah diperoleh. Setelah itu akan dilengkapi dengan analisis pribadi peneliti untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Debit dalam Studi Kasus Putusan Nomor 985/Pid.B/2012/PN.MKS.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum dan disertai dengan sanksi pidana. Dimana sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Penerapan hukum tindak pidana yang penulis bahas terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan kartu debit dalam studi kasus putusan nomor 985/Pid.B/2012/PN.Mks yang didakwa melanggar Pasal 46 ayat (3) jo, Pasal 30 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 serta pasal-pasal lain yang bersangkutan.

1. Identitas Terdakwa

a. Terdakwa I

Terdakwa I bernama Muhammad Arsyad alias Arsyad 20 tahun. Lahir di Caddika Kab. Gowa pada tanggal 20 Mei 1992. Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Bontonompo Kab.

Gowa. Beragama Islam dan pekerjaan sebagai mantan karyawan Alfa Midi.

b. Terdakwa II

Terdakwa II bernama Chaidir Qabir Bahar Alias Chaidir 19 Tahun. Lahir di Makassar tanggal 28 Agustus 1993. Jenis Kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Naja Dg. Nai Kota Makassar. Beragama Islam dan pekerjaan sebagai mantan karyawan Alfa Midi.

2. Posisi Kasus

Terdakwa I Muhammad Arsyad melakukan pembelanjaan dengan menggunakan kartu debit Bank BCA pada Hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan Hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar pukul dalam waktu yang tidak dapat dipastikan bersama-sama dengan terdakwa II Chaidir Qabir Bahar Alias Chaidir pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 dan Hari Jumat tanggal 21 September 2012 bertempat di Alfa Midi Jl. Hertasning 1 Makassar telah sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/ atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa.

Awalnya terdakwa I Muhammad Arsyad Alias Arsyad melakukan pembelanjaan dengan menggunakan kartu debit Bank

BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu BCA dengan nomor seri 6019001628510335 kemudian melakukan swit (gesek) pada mesin gesek yang disediakan pada kasir Alfa Midi, setelah itu terdakwa melakukan pembatalan pembelanjaan sehingga terjadi cash out yang ditambahkan terdakwa sebesar jumlah yang diinginkan yakni setiap kali melakukan transaksi sebesar Rp500.000,- setiap kali sebanyak sebelas kali sebesar Rp5.400.000,- dan terdakwa II Chaidir Qabir Bahar Alias Chaidir melakukan pembelanjaan dengan menggunakan kartu debit Bank BCA dengan nomor kartu BCA dengan nomor seri 6019001628510335 yang sebelumnya sudah dipergunakan sebelumnya oleh terdakwa dimana kartu tersebut dipergunakan terdakwa II kemudian melakukan swit (gesek) pada mesin gesek yang disediakan pada kasir Alfa Midi, setelah itu terdakwa melakukan pembatalan pembelanjaan sehingga terjadi cash out yang ditambahkan terdakwa sebesar jumlah yang diinginkan yakni setiap kali melakukan transaksi sebesar melakukan pembatalan pembelanjaan sehingga terjadi *cash out* yang ditambahkan terdakwa sebesar jumlah yang diinginkan yakni setiap kali melakukan transaksi sebesar Rp500.000,- sebanyak enam kali sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terdakwa II Chaidir Qabir Bahar Alias Chaidir mulai bekerja pada alfa midi Makassar pada tanggal 10 Oktober 2011 sampai

tanggal 21 september 2012 dan mempunyai kewenangan untuk melakukan cash out dimana mereka terdakwa telah melampaui kewenangan atau menjebol sistem pengamanan.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada kasus ini berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana penyalahgunaan kartu debit yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I Muhammad Arsyad Alias Arsyad pada hari selasa tanggal 28 agustus 2012 sampai dengan hari selasa tanggal 11 september 2012 sekitar pukul dalam waktu yang tidak dapat dipastikan bersama-sama dengan terdakwa II Chaidir Qabir Bahar Alias Chaidir pada hari kamis tanggal 20 september 2012 dan hari jumat tanggal 21 september 2012 bertempat di Alfa Midi Jl. Hertasning Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili telah sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/ atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I Muhammad Arsyad Alias Arsyad melakukan pembelian dengan menggunakan kartu debit Bank BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu BCA dengan nomor seri 6019001628510335 kemudian melakukan swit (gesek) pada mesin gesek yang disediakan pada kasir Alfa Midi, setelah itu terdakwa melakukan pembatalan pembelian sehingga terjadi *cash out* yang ditambahkan terdakwa sebesar jumlah yang diinginkan yakni

setiap kali melakukan transaksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali sebanyak sebelas kali sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Chaidir Qabir Bahar Alias Chaidir melakukan pembelanjaan dengan menggunakan kartu debit Bank BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu BCA dengan nomor seri 6019001628510335 yang sebelumnya sudah dipergunakan sebelumnya oleh terdakwa dimana kartu tersebut dipergunakan terdakwa II kemudian melakukan swit (gesek) pada mesin gesek yang disediakan pada kasir alfa midi, setelah itu terdakwa melakukan pembatalan pembelanjaan sehingga terjadi *cash out* yang ditambahkan terdakwa sebesar jumlah yang diinginkan yakni setiap kali melakukan transaksi sebesar melakukan pembatalan pembelanjaan sehingga terjadi *cash out* yang ditambahkan terdakwa sebesar jumlah yang diinginkan yakni setiap kali melakukan transaksi sebesar Rp500.000,- sebanyak enam kali sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Dimana terdakwa II Chaidir Qabir Bahar Alias Chaidir mulai bekerja pada alfa midi Makassar pada tanggal 10 Oktober 2011 sampai tanggal 21 september 2012 dan mempunyai kewenangan untuk melakukan *cash out* dimana mereka terdakwa telah melampaui kewenangan atau menjebol sistem pengamanan.
- Bahwa kartu yang digunakan para terdakwa bersama-sama untuk melakukan *cash out* tersebut.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban Sukhron Makmur sebagai manager PT Alfa Midi Hertasning I Makassar yang ditaksir kerugian sebesar kurang lebih Rp62.400.000,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 30 ayat (3) Undang-undang RI No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KEDUA

Bahwa terdakwa I Muhammad Arsyad Alias Arsyad pada hari selasa tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan hari selasa tanggal 11 september 2012 sekitar pukul dalam waktu yang tidak dapat dipastikan bersama dengan terdakwa II Chaidir Qabir Bahar Alias Chaidir pada hari kamis tanggal 20 september 2012 dan hari jumat tanggal 21 september 2012 bertempat di Alfa Midi Jl. Hertasning I Makassar berdasarkan Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e, Pasal 64 ayat (1) KUHP maka pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara ini yang melakukan, menyuruh

melakukan dan turut serta melakukan yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e, Pasal 64 ayat (1) KUHP yakni barang siapa dengan sengaja melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau mendapat upah untuk itu, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (3) jo, Pasal 30 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang transaksi informasi dan elektronik berbunyi: Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp800.000.000,-. Adapun unsur-unsur Pasal 46 ayat (3) jo, Pasal 30 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam

persidangan ini adalah Muhammad Arsyad dan Chaidir Qabir Bahar sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa fakta tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hakim.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/ atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar hukum, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar terdakwa I Muhammad Arsyad melakukan pembelian dengan menggunakan kartu debit Bank BCA pada Hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan Hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar pukul dalam waktu yang tidak dapat dipastikan bersama-sama dengan terdakwa II Chaidir Qabir Bahar Alias Chaidir pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 dan Hari Jumat tanggal 21 September 2012 bertempat di Alfa Midi Jl. Hertasning 1 Makassar telah sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/ atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar,

menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa.

Bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang semua telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yaitu:

1. Saksi Sukhron Makmun (35 tahun), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa objek dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam jabaran yang diduga dilakukan oleh tersangka saudara Muhammad Arsyad dan tersangka saudara Chaidir Qabir Bahar mulai dari Bulan Juli 2012 sampai Bulan September 2012 adalah uang tunai.
- Bahwa jumlah uang Alfa Midi Jl. Hertasing 1 Makassar yang digelapkan tersangka saudara Muhammad Arsyad dan tersangka saudara Chaidir Qabir Bahar adalah uang sebesar Rp62.400.000,- (Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) milik Alfa Midi Jl. Hertasing 1 Makassar.
- Bahwa cara kedua tersangka melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan di Alfa Midi Jl. Hertasing 1 Makassar menggunakan dua cara. Pertama melakukan pembelian menggunakan Kartu

Debit BCA kemudian melakukan swit (gesek) pada mesin gesek yang disediakan pada kasir Alfa Midi, setelah itu tersangka melakukan pembatalan belanjanya sehingga terjadi *cash out* yang ditambahkan sebesar yang tersangka inginkan. Kedua dengan mempergunakan hak/kewenangan jabatannya sebagai MD untuk melakukan otorisasi/pembatalan transaksi yang telah dilakukan tersangka namun transaksi tersebut tetap tercatat pada kasir Alfa Midi dan dengan cara tersebut sehingga terjadi *cash out* yang dibatalkan dari transaksi Kartu Debit BCA tersangka mendapatkan sejumlah uang dari kasir Alfa Midi, dan untuk cara kedua dilakukan oleh tersangka pada waktu-waktu yang sunyi atau pada saat kurang pengunjung.

- Bahwa akibat dari penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh tersangka pada Alfa Midi Jl. Hertasing 1 Makassar pihak Alfa Midi dirugikan sebesar Rp60.200.000,-.

2. Saksi Dina Pramitasari (24 tahun), pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cara tersangka Muhammad Arsyad menggelapkan uang milik Alfa Midi dengan cara belanja pada Alfa Midi Jl. Hertasing 1 Makassar setelah itu

melakukan scan dikasir selanjutnya menggesek Kartu Debit BCA pada mesin edisi BCA dan keluar struk belanja, setelah itu tersangka Muhammad Arsyad memasukkan atau mengetik kode otoritas dan terminal belanja di komputer kasir.

- Bahwa tidak mengetahui secara pasti sudah berapa kali tersangka Muhammad Arsyad melakukan penipuan dan atau penggelapan di kasir saksi.
- Bahwa akibat dari penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh tersangka pada Alfa Midi Jl. Hertasing 1 Makassar pihak Alfa Midi dirugikan sebesar Rp60.200.000,-.

3. Saksi St. Aisyah (18 tahun), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cara tersangka Muhammad Arsyad mengambil barang Toko Alfa Midi minimal harga barang belanjaan Rp25.000,- kemudian menggesek Kartu Debit BCA ke mesin BCA yang disediakan di depan kasir, setelah itu memasukkan nilai nominal belanjaan yang tertera pada komputer kasir yang selanjutnya dienter dan setelah itu *cash out* untuk selanjutnya ditulis nilai nominal Rp50.000,-.

- Bahwa perbuatan tersangka Muhammad Arsyad tersebut saksi ketahui sekitar awal bulan Agustus 2012 sampai sekarang, namun perbuatan tersangka Muhammad Arsyad tersebut saksi tahu sebagai tindak pidana kejahatan setelah pihak penanggung jawab Alfa Midi melaporkan tersangka Muhammad Arsyad pada pihak kepolisian.
- Bahwa alat yang digunakan oleh tersangka Muhammad Arsyad melakukan tindak pidana penipuan dan atau pengggelapan dalam jabatan pada Alfa Midi Jl. Hertasing 1 Makassar adalah berupa 1 (satu) buah Kartu Debit BCA.
- Bahwa perbuatan tersangka Muhammad Arsyad tersebut dilakukan sendirian.
- Bahwa perbuatan tersangka Muhammad Arsyad dilakukan pada saat buka dan waktunya tidak tentu.
- Bahwa jabatan tersangka Muhammad Arsyad pada Alfa Midi Jl. Hertasing 1 Makassar adalah sebagai MD (Merchandise) yang bertanggung jawab penuh pada Alfa Midi Jl. Hertasing 1 Makassar sedangkan jabatan saksi adalah sebagai kasir.
- Bahwa perbuatan dari tersangka Muhammad Arsyad saksi tidak mengetahui sudah berapa kali melakukan

cash out pada kasir Alfa Midi Jl. Hertasing 1 Makassar namun perbuatan tersebut sudah berulang kali saksi lihat dilakukannya, dan setiap tersangka Muhammad Arsyad melakukan *cash out* itu minimal Rp500.000,-.

- Bahwa akibat dari penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh tersangka Muhammad Arsyad pada Alfa Midi Jl. Hertasing 1 Makassar pihak Alfa Midi dirugikan sebesar Rp60.200.000,-.

4. Saksi Adrianti (19 tahun), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama karyawan di Alfa Midi Jl. Hertasing 1 Makassar yang tersebut adalah tersangka Muhammad Arsyad dan tersangka Chaidir Qabir Bahar dimana keduanya merupakan MD atau memiliki tanggung jawab penuh kepada Alfa Midi tersebut.
- Bahwa jumlah uang perusahaan yang telah digelapkan oleh tersangka Muhammad Arsyad dan tersangka Chaidir Qabir Bahar adalah sebesar Rp60.200.000,-.
- Bahwa alat yang digunakan oleh tersangka Muhammad Arsyad adalah satu buah Kartu Debit BCA.
- Bahwa cara kedua tersangka melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan di Alfa

Midi Jl. Hertasing 1 Makassar menggunakan dua cara. Pertama melakukan pembelian menggunakan Kartu Debit BCA kemudian melakukan swit (gesek) pada mesin gesek yang disediakan pada kasir Alfa Midi, setelah itu tersangka melakukan pembatalan belanjanya sehingga terjadi *cash out* yang ditambahkan sebesar yang tersangka inginkan. Kedua dengan mempergunakan hak/kewenangan jabatannya sebagai MD untuk melakukan otorisasi/pembatalan transaksi yang telah dilakukan tersangka namun transaksi tersebut tetap tercatat pada kasir Alfa Midi dan dengan cara tersebut sehingga terjadi *cash out* yang dibatalkan dari transaksi Kartu Debit BCA tersangka mendapatkan sejumlah uang dari kasir Alfa Midi, dan untuk cara kedua dilakukan oleh tersangka pada waktu-waktu yang sunyi atau pada saat kurang pengunjung.

- Bahwa tidak mengetahui sudah berapa kali kedua tersangka melakukan penggelapan di kasir Alfa Midi yang pasti kedua pelaku sering melakukan hal tersebut bahkan ketika kedua tersangka sedang tidak jaga juga sering datang melakukan penggelapan tersebut.
- Bahwa akibat dari penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh kedua tersangka

pada Alfa Midi Jl. Hertasing 1 Makassar pihak Alfa Midi dirugikan sebesar Rp60.200.000,-.

5. Saksi Rahmawati., S.Kom. (31 tahun), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi pada PT. Alfa Midi Utama Indonesia adalah sebagai *finance* yang bertanggungjawab melakukan monitoring atas Transaksi Kartu (*debit, credit cash out*), *Compare* Transaksi Kartu dengan penggantian dari pihak Bank
- Bahwa cara saksi mendapatkan *Compare* Transaksi Kartu Toko vs Mutasi BCA No. Kartu 6019001628510335 tersebut adalah dengan cara diperoleh dari sistem transaksi yang ada di toko, kemudian dibandingkan dengan penggantian yang dilakukan oleh pihak Bank.
- Bahwa dari data transaksi yang tidak penggantian dari pihak bank dilakukan pengecekan dilapangan baik melalui CCTV meupun introgasi ke personil toko langsung.
- Bahwa terhadap uang yang berjumlah Rp60.200.000,- tersebut yang dilaporkan oleh Muhammad Sukran tersebut semuanya tidak berdasarkan No. Kartu

6019001628510335 melainkan menggunakan 4 (empat) nomor Kartu Debit BCA.

- Bahwa terhadap tiga nomor kartu yang lain saksi tidak mengetahuinya ataupun digunakan oleh siapa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali tersangka Muhammad Arsyad dan Chaidir Qabir Bahar menggunakan No. Kartu 6019001628510335 tersebut namun kerugian Alfa Midi akibat perbuatannya tersebut berdasarkan *Compare Transaksi Card* adalah sebesar Rp32.486.801.

3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan menggunakan akal atau tipu muslihat atau dengan keterangan perkataan bohong.

Bahwa fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti sebagai berikut:

- Keterangan Saksi I Sukhron Makmun orang yang patut diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan di Alfa Midi Jl. Hertasning 1 Makassar adalah tersangka Muhammad Arsyad dan tersangka Chaidir Qabir Bahar yang merupakan karyawan Alfa Midi yang diberi tanggung jawab (MD) tanpa izin pada pemilik atau penanggung jawab pada Alfa Midi Jl. Hertasning 1 Makassar.

- Keterangan Saksi II Dina Pramitasari pelaku penggelapan uang milik perusahaan Alfa Midi Jl. Hertasning 1 Makassar adalah Muhammad Arsyad dan nama perusahaan yang telah digelapkan adalah Alfa Midi Jl. Hertasning 1 Makassar, dengan cara tersangka melakukan pembelian pada Toko Alfa Midi Jl. Hertasning 1 Makassar kemudian melakukan *cash out* atau pembatalan pada mesin Bank BCA setelah itu mengambil sejumlah uang yang telah di *cash out* sebelumnya. .
- Keterangan Saksi III St. Aisyah yang patut diduga telah melakukan penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan tersebut adalah tersangka Muhammad Arsyad, dengan cara tersangka Muhammad Arsyad mengambil barang Toko Alfa Midi minimal harga barang Rp25.000,- kemudian menggesek Kartu Debet BCA ke mesin BCA yang disediakan di depan kasir setelah itu memasukkan nilai nominal belanjaan yang tertera pada komputer kasir selanjutnya dienter setelah itu *cash out* untuk selanjutnya ditulis nilai nominal Rp500.000,-.
- Keterangan tersangka Muhammad Arsyad bahwa ia melakukan penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan pada tempat dimana tersangka bekerja yakni

sejak tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan 11 September 2012 setiap tersangka melaksanakan tugas malam pada Alfa Midi Alfa Midi Jl. Hertasning 1 Makassar.

- Keterangan tersangka Chaidir Qabir Bahar yang melakukan penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan pada tanggal 20 September 2012 dan tanggal 21 September 2012 di Toko Alfa Midi Jl. Hertasning 1 Makassar adalah tersangka dan tersangka Muhammad Arsyad dan jabatan tersangka pada Alfa Midi Jl. Hertasning 1 Makassar tersebut adalah sebagai MD Fungsi (pembantu penanggung jawab).

4. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang.

Bahwa fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti berikut:

- Keterangan Saksi I Sukhron Makmun orang yang patut diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan di Alfa Midi Jl. Hertasning 1 Makassar adalah tersangka Muhammad Arsyad dan tersangka Chaidir Qabir Bahar yang merupakan karyawan Alfa Midi yang diberi tanggung jawab (MD)

tanpa izin pada pemilik atau penanggung jawab pada Alfa Midi Jl. Hertasning 1 Makassar.

- Keterangan Saksi II Dina Pramitasari pelaku penggelapan uang milik perusahaan Alfa Midi Jl. Hertasning 1 Makassar adalah Muhammad Arsyad dan nama perusahaan yang telah digelapkan adalah Alfa Midi Jl. Hertasning 1 Makassar, dengan cara tersangka melakukan pembelian pada Toko Alfa Midi Jl. Hertasning 1 Makassar kemudian melakukan *cash out* atau pembatalan pada mesin Bank BCA setelah itu mengambil sejumlah uang yang telah di *cash out* sebelumnya. .
- Keterangan Saksi III St. Aisyah yang patut diduga telah melakukan penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan tersebut adalah tersangka Muhammad Arsyad, dengan cara tersangka Muhammad Arsyad mengambil barang Toko Alfa Midi minimal harga barang Rp25.000,- kemudian menggesek Kartu Debet BCA ke mesin BCA yang disediakan di depan kasir setelah itu memasukkan nilai nominal belanjaan yang tertera pada komputer kasir selanjutnya dienter setelah itu *cash out* untuk selanjutnya ditulis nilai nominal Rp500.000,-.

- Keterangan saksi V Rahmawati., S.Kom. cara saksi mendapatkan *Compare Transaksi Card Toko* vs Mutasi BCA No. Kartu 6019001628510335 tersebut adalah dengan cara diperoleh dari sistem transaksi yang ada di toko, kemudia dibandingkan dengan penggantian yang dilakukan oleh pihak bank.
- Keterangan tersangka Muhammad Arsyad bahwa ia melakukan penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan pada tempat dimana tersangka bekerja yakno sejak tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan 11 September 2012 setiap tersangka melaksanakan tugas malam pada Alfa Midi Alfa Midi Jl. Hertasning 1 Makassar.
- Keterangan tersangka Chaidir Qabir Bahar yang melakukan penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan pada tanggal 20 September 2012 dan tanggal 21 September 2012 di Toko Alfa Midi Jl. Hertasning 1 Makassar adalah tersangka dan tersangka Muhammad Arsyad dan jabatan tersangka pada Alfa Midi Jl. Hertasning 1 Makassar tersebut adalah sebagai MD Fungsi (pembantu penanggung jawab).

4. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan uraian yang di atas, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar MENUNTUT supaya kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusanya terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Arsyad Alias Arsyad dan II Chaidir Qabir Bahar Alias Chaidir bersalah melakukan tindak pidana "transaksi informasi dan elektronik dan atau penggelapan dalam jabatan":
2. Menjatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan:
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM (*Automated Teller Machine*) dari BCA (Bank Central Asia) dengan nomor 6019001628510335 dirampas untuk dimusnahkan:
 - Uang tunai sebesar Rp8.400.000,- dikembalikan kepada Alfa Midi Hertasning:
 - 1 (satu) lembar struk ATM (*Automated Teller Machine*) dari BCA (Bank Central Asia):
 - 1 (satu) buah pistations warna hitam:

- 2 (dua) lembar kertas hasil audit kartu debit BCA (Bank Central Asia) dengan nomor seri 6019001628510335 masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah):

5. Amar Putusan

Adapun yang telah menjadi amar putusan dalam perkara Nomor: 985/Pid.B/2012/PN.Mks adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Arsyad Alias Arsyad dan Terdakwa II Chaidir Qabir Bahar Alias Chaidir bersalah melakukan tindak pidana "transaksi informasi dan elektronik dan atau penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM (*Automated Teller Machine*) dari BCA (Bank Central Asia) dengan nomor 6019001628510335 dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp8.400.000,- dikembalikan kepada Alfa Midi Hertasning;
 - 1 (satu) lembar struk ATM (*Automated Teller Machine*) dari BCA (Bank Central Asia);
 - 1 (satu) buah pistations warna hitam;

- 2 (dua) lembar kertas hasil audit kartu debit BCA (Bank Central Asia) dengan nomor seri 6019001628510335 masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

6. Analisis Penulis

Surat dakwaan atau tuduhan adalah surat atau akta yang memuat suatu perumusan tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan), yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Menurut Pasal 143 KUHAP, bahwa surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi, ialah:

a. Syarat-syarat Formil

Syarat formil surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, yang mencakup:

1. Diberi tanggal;
2. Memuat identitas terdakwa secara lengkap, meliputi:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Tempat, umur/tanggal lahir;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Kebangsaan;
 - e. Tempat tinggal;

f. Agama, dan

g. Pekerjaan

3. Ditandatangani oleh Penuntut Umum

b. Syarat-syarat Materil

Syarat materil menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Adapun jenis-jenis dakwaan dibagi menjadi 5 (lima) yaitu:

1. Dakwaan tunggal, yaitu hanya satu jenis tindak pidana saja yang didakwakan kepada terdakwa, yakni melanggar ketentuan Pasal tersebut.
2. Dakwaan alternatif, yaitu ada beberapa banyak dakwaan tetapi hanya satu yang harus dibuktikan tergantung dari hasil persidangan.
3. Dakwaan kumulatif, yaitu banyak dakwaan atau banyak pelanggaran (banyak Pasal).
4. Dakwaan subsidaritas (bersusun), dakwaan yang bersusun yaitu dakwaan primer (yang harus dibuktikan terlebih dahulu atau dari segi ancaman pidana) dan dakwaan subsidair. Perkara yang sama tidak bisa dilakukan dua kali berdasarkan fakta-fakta di persidangan atau beberapa tindak pidana.

5. Dakwaan gabungan (kombinasi) dari dakwaan kumulatif, dakwaan alternatif dan dakwaan subsidaritas.

Berdasarkan putusan perkara No. 1985/Pid.B/2012/PN.Mks, menyatakan bahwa terdakwa Arsyad Alias Arsyad dan Chaidir Qabir Bahar Alias Chaidir terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam unsur Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 30 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e, Pasal 64 ayat (1) KUHP oleh karena itu dakwaan ini kami susun secara alternatif dan unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan kesatu maka olehnya itu dakwaan atau kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Berikut merupakan bunyi Pasal 46 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008:

Pasal 30

- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 46

- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Adapun unsur-unsur dari Pasal 46 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang

Setiap orang yang dimaksud adalah baik orang maupun badan hukum sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini setiap orang yang dimaksudkan berwujud orang dan menunjuk kepada para terdakwa Arsyad Alias Arsyad dan Chaidir Qabir Bahar Alias Chaidir yang dipersidangkan telah mengakui dan membenarkan identitasnya baik dalam dakwaan maupun dalam surat tuntutan ini. Selain itu dalam persidangan para terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula menilai barang bukti maupun keterangan-keterangan yang diberikan saksi-saksi.

Dengan demikian dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah dewasa berakal sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga oleh hukum dianggap cakap atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut diperkuat oleh para terdakwa sendiri yang oleh setiap persidangan selalu menyatakan dalam keadaan sehat

jasmani dan rohani dan bersedia untuk mengikuti persidangan.
Akhirnya unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

2. Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri telah bersama-sama menggunakan kartu debit BCA untuk melakukan *cash out* atau pembatalan transaksi pada komputer kasir Alfa Midi Jl. Hertasning 1 Makassar. Akhirnya unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Dengan Sengaja

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sidang, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri dimana para terdakwa beraksi pada saat sepi pembeli, sehingga timbul keinginan mendebet dengan menggunakan kartu debit BCA tersebut lalu membatalkan pembelanjaan tersebut. Akhirnya unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Tanpa Hak

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sidang, dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan para terdakwa sendiri telah melakukan *cash out*

atau pembatalan pembelanjaan pada komputer dengan cara menggunakan kartu debit tanpa izin dari pimpinan. Akhirnya unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Mengakses Komputer atau Sistem Elektronik dengan Cara Apapun, Melanggar, Menerobos Melampaui atau Menjebol Sistem Pengamanan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri telah melakukan mengakses komputer atau menggesek dengan menggunakan kartu debit pada kasir kasir alfa midi dengan cara membatalkan transaksi pembelanjaan atau cash out tersebut, dengan menjebol sistem transaksi pada kasir komputer Alfa Midi. Akhirnya unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

6. Dimana Perbuatan Tersebut Terdiri Dari Beberapa Perbuatan yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut.

Dimana perbuatan tersebut terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa

sendiri dimana kartu debit yang digunakan terdakwa I untuk membatalkan transaksi *cash out* tersebut lalu dipergunakan lagi oleh terdakwa II sehingga dianggap perbuatan berlanjut. Akhirnya unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berpendapat bahwa penerapan hukum terhadap tindak Pidana penyalahgunaan kartu debit dalam perkara putusan No.91985/Pid.B/2012/PN.Mks. telah sesuai dengan delik yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana dalam unsur-unsurnya telah mencocoki rumusan delik .

Setelah penulis menganalisis dakwaan Penuntut Umum dalam kasus tersebut di atas, maka dakwaan jaksa Penuntut Umum telah memiliki sifat dan hakikat suatu dakwaan, yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat perbuatan itu berlangsung sesuai yang disyaratkan pada Pasal 143 KUHP tentang syarat-syarat surat dakwaan, sehingga dengan demikian maka menurut penulis, dakwaan tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 30 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e, Pasal 64 ayat (1) KUHP.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 985/Pid.B/2012/PN.MKS.

1. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara 985/Pid.B/2012/PN.MKS tertanggal 14 Maret 2013 yaitu sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa I Muhammad Arsyad Alias Arsyad pada hari selasa tanggal 28 agustus 2012 sampai dengan hari selasa tanggal 11 september 2012 sekitar pukul dalam waktu yang tidak dapat dipastikan bersama-sama dengan terdakwa II Chaidir Qabir Bahar Alias Chaidir pada hari kamis tanggal 20 september 2012 dan hari jumat tanggal 21 september 2012 bertempat di Alfa Midi Jl. Hertasning Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili telah sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan / atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I Muhammad Arsyad Alias Arsyad melakukan pembelian dengan menggunakan kartu debit Bank BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu BCA dengan nomor seri 6019001628510335 kemudian melakukan swit (gesek) pada mesin gesek yang disediakan pada kasih alfa midi, setelah itu terdakwa melakukan pembatalan pembelian sehingga terjadi cash out yang ditambahkan terdakwa sebesar jumlah yang diinginkan yakni setiap kali melakukan transaksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali sebanyak sebelas kali sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Chaidir Qabir Bahar Alias Chaidir melakukan pembelian dengan menggunakan kartu debit Bank BCA

(Bank Central Asia) dengan nomor kartu BCA dengan nomor seri 6019001628510335 yang sebelumnya sudah dipergunakan sebelumnya oleh terdakwa dimana kartu tersebut dipergunakan terdakwa II kemudian melakukan swit (gesek) pada mesin gesek yang disediakan pada kasir alfa midi, setelah itu terdakwa melakukan pembatalan pembelanjaan sehingga terjadi *cash out* yang ditambahkan terdakwa sebesar jumlah yang diinginkan yakni setiap kali melakukan transaksi sebesar melakukan pembatalan pembelanjaan sehingga terjadi *cash out* yang ditambahkan terdakwa sebesar jumlah yang diinginkan yakni setiap kali melakukan transaksi sebesar Rp500.000,- sebanyak enam kali sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Dimana terdakwa II Chaidir Qabir Bahar Alias Chaidir mulai bekerja pada alfa midi Makassar pada tanggal 10 Oktober 2011 sampai tanggal 21 september 2012 dan mempunyai kewenangan untuk melakukan *cash out* dimana mereka terdakwa telah melampaui kewenangan atau menjebol sistem pengamanan.
- Bahwa kartu yang digunakan para terdakwa bersama-sama untuk melakukan *cash out* tersebut.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban Sukhron Makmur sebagai manager PT Alfa Midi Hertasning I Makassar yang ditaksir kerugian sebesar kurang lebih Rp62.400.000,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e, Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM - 860/Mks/EP/11/ 2012 tanggal 14 desember 2012 yang melanggar pasal sebagaimana dalam dakwaan Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 30 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 serta pasal-pasal lain yang bersangkutan;

- Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM (Automated Teller Machine) dari BANK BCA (Bank Central Asia) dengan nomor 6019001628510335 dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai sebesar Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Alfa Midi Hertasning, 1 (satu) lembar struk ATM (Automated Teller Machine) dari BANK BCA (Bank Central Asia), 1 (satu) buah pistations warna hitam, 2 (dua) lembar kertas hasil audit kartu debit BCA (Bank Central Asia) dengan nomor seri 6019001628510335 masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menhadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah, yakni saksi Sutan Makmur dan saksi Rahmawati, S.Kom sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya termuat didalam berita acara;
- Menimbang, bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa saling menunjukkan kesesuaian yang didukung pula dengan barang bukti yang ada, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana "Transaksi informasi dan elektronik dan atau penggelapan dalam jabatan";

- Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

➤ Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

➤ Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan.
- Para terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp8.400.000,-. Dimana terdakwa Muhammad Arsyad sebesar Rp5.300.000,- dan terdakwa Chaidir Qabir Bahar sebesar Rp4.000.000,-.

2. Analisis Penulis

Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan putusan pengadilan atau putusan adalah pernyataan yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor: 985/Pid.B/2012/PN.Mks.

Dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, Majelis memiliki banyak pertimbangan, mulai dari tuntutan umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan Pasal yang didakwakan serta tetap memperhatikan undang-undang pengadilan anak dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis .

Pertimbangan putusan pengadilan negeri dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan pengadilan negeri yang didasarkan kepada fakta-fakta yang mana fakta tersebut tergolong atau dikualifikasi sebagai fakta yuridis sebagaimana telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat kita sebut sebagai pertimbangan yuridis. Seperti halnya pertimbangan yang terdapat dalam putusan No. 985/Pid.B/2012/PN.Mks.

2. Pertimbangan nonyuridis

Pertimbangan nonyuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik

melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara putusan No. 985/Pid.B/2012/PN.Mks. bahwa sanksi yang diberikan sudah tepat jika melihat dari hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam perkara putusan No. 985/Pid.B/2012/PN.Mks. ialah perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat, sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa ialah para terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, dan para terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp8.400.000,-.. Dengan sanksi pidana penjara 6 (enam) bulan yang dijatuhkan oleh diharapkan mampu memberi efek jera kepada para terdakwa dan para terdakwa diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materil atas tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu Muhammad Arsyad dan Chaidir Qabir Bahar telah sesuai dengan dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum yakni Pasal 46 ayat (3) jo, Pasal 30 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang transaksi informasi dan elektronik. Berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis, dengan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
2. Dalam memutus perkara majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan Pasal yang didakwakan, sehingga dinyatakan bersalah. Kemudian adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu

perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan menimbulkan ketakutan bagi warga sekitar, sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa masih di bawah umur yang masih perlu bimbingan dan ingin menggapai masa depan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dan terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya. Kedua hal tersebut juga menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam penegakan kasus tindak pidana penyalahgunaan kartu debit kedepannya aparat hukum dapat mempertimbangkan Undang Undang Perbankan dengan berlandaskan pada asas Kekhususan yang Sistematis kedalam menyelesaikan kasus.
2. Tindak pidana dalam ruang lingkup perbankan telah mengalami perkembangan yang pesat dengan adanya *electronic banking* atau *internet banking*. Maka dari itu, perlu dibuat undang undang tindak pidana khusus perbankan untuk memudahkan penegak hukum dalam menangani tindak pidana perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Jakarta: Rineka Cipta
- Chainur Arrasjid, 2011, *Hukum Pidana Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Kartonegoro, *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa
- Lukman Santoso AZ, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Maskun, 2010, *Buku Ajar Kejahatan Siber*
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama
- PAF Lamintang dan Djisman Samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- PAF Lamintang, 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: CV. Sinar Baru.
- _____, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Poernomo, Bambang, 1992 *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ranoemihardja, R. Atang, 1984. *Hukum Pidana, Azas-azas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat Beberapa Sarjana*, Bandung: Tarsito.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press..

- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Suhariyatno Budi, 2013, *Tindak Pidana Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Turban, Rainer, Potter, 2005, *Introduction to Information Technology*. John Wiley & Sons, Inc. USA
- Wirjono Projodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama
- Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zarkoczy Peter, 1988, *Jaringan Informasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Undang-Undang

- Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1985/Pid.B/2012/PN.MKS
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik